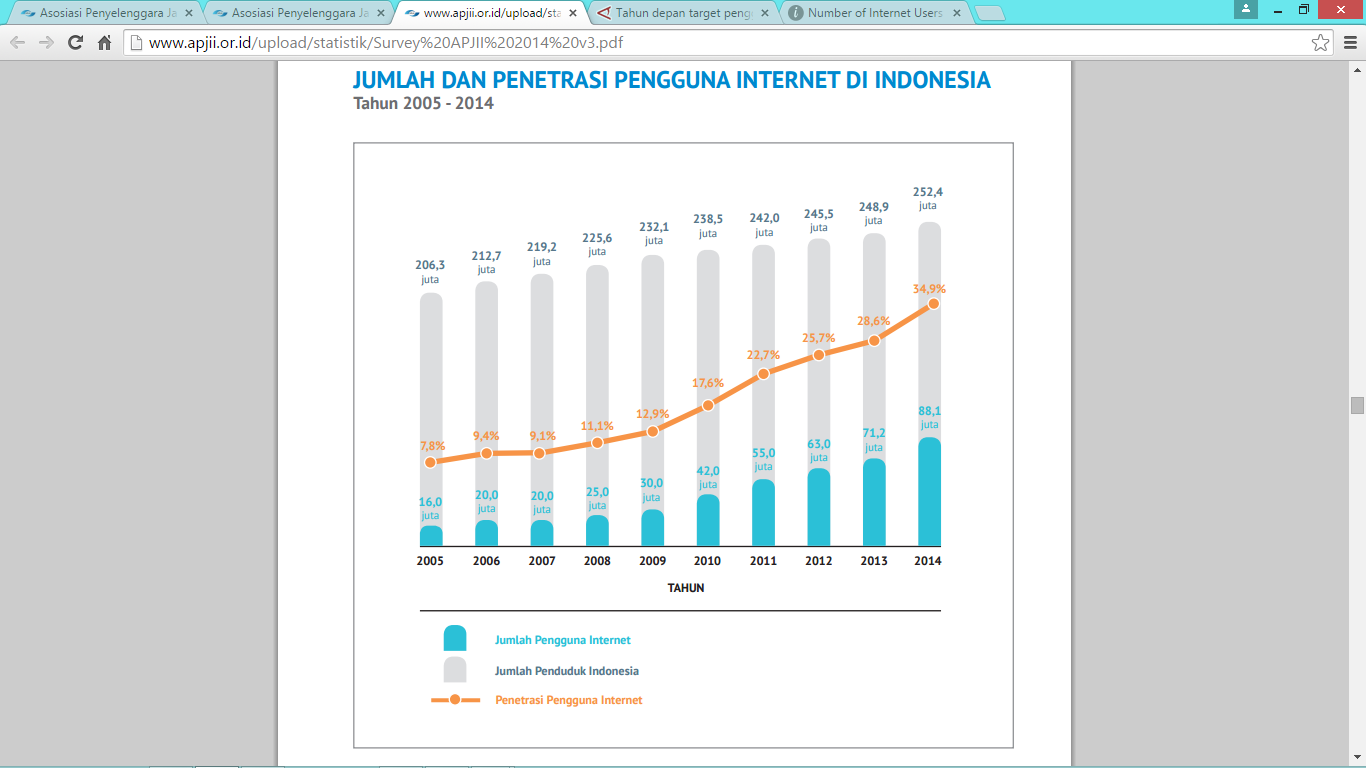
**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada negara maju saat ini sudah semakin banyak di gunakan oleh pemerintahannya sebagai sistem informasi publik.Pada beberapa negara maju yang ada di dunia seperti USA, Jepang, dan China mampu bangkit dari krisis dan meningkatkan ekonominya 3 kali lipat dalam waktu yang relatif singkat karena dukungan pemanfaatan teknologi informasi yang baik.Ini terlihat dari negara – negara yang memiliki jumlah penggunaan internet terbanyak di dunia.Meningkatnya penggunaan internet maka akan meningkatkan harapan penduduk agar layanan pemerintahan bisa dilakukan secara online. Berkaitan dengan ini ( Hartono, 2006 ) menyatakan bahwa, Peran sistem dan teknologi informasi saat ini tidak hanya untuk efisiensi dan efektivitas, melainkan juga peran strategik untuk memenangkan persaingan.

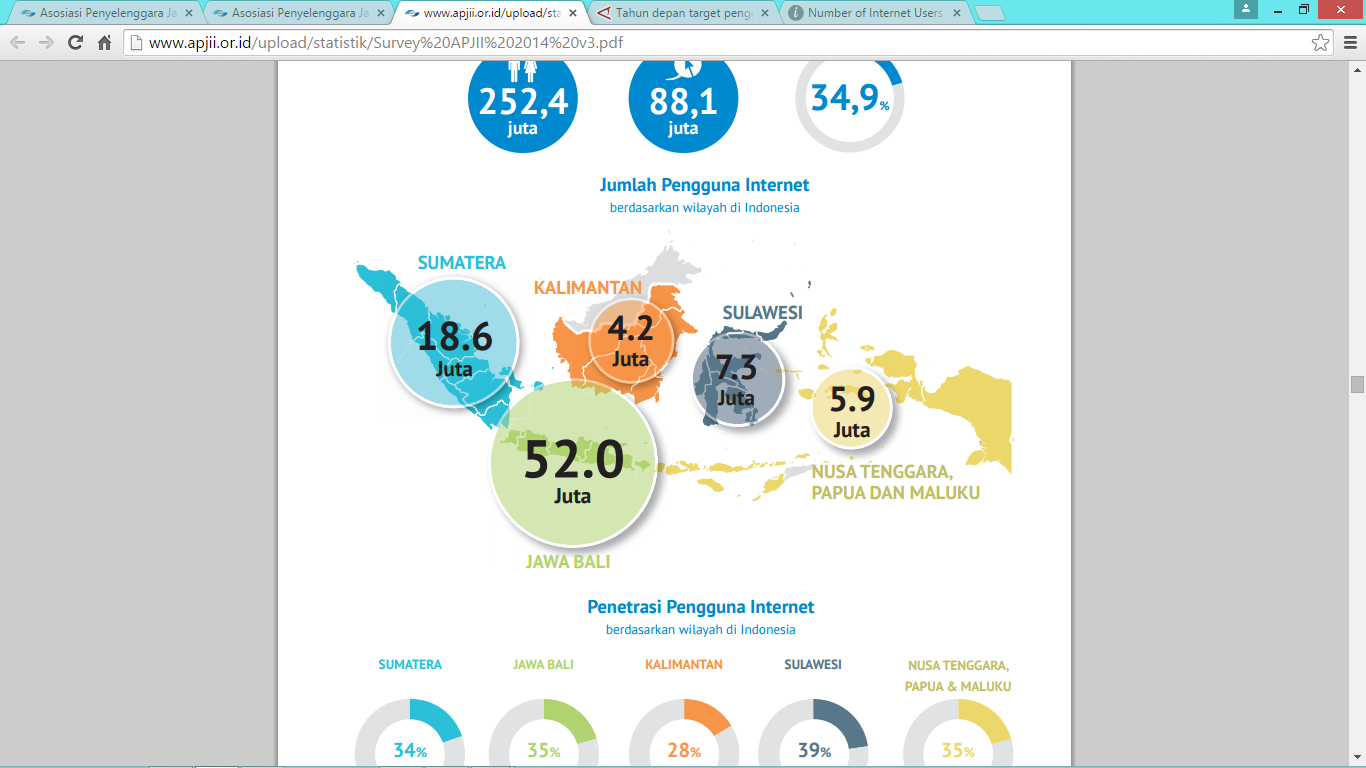
Di indonesia sendiri kondisi teknologi informasi sudah sangat maju ini terlihat dari jumlah akses internet pada tahun 2014 yang mancapai 88,1 juta atau 34,9 %. (APJII) dan pada akhir tahun 2015 Kemenkominfo targetkan jumlah pengguna Internet di Indonesia telah mencapai angka 150 juta orang, atau sekitar 61% dari total penduduk.



**Gambar 1.1 : Jumlah Penggunaan Internet di Indonesia Tahun 2005 - 2014**

Pada gambar 1.1 diatas, terjadi peningkatan penggunaan internet oleh penduduk di Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Di tahun 2005 jumlah pengguna internet sebanyak 16 juta jiwa dari 206.3 juta jumlah penduduk Indonesia dan penetrasi pengguna internetnya yaitu 7.8 % pada tahun 2005. Hal ini terus mengalami peningkatanyang cukup besar sampai pada tahun 2014 jumlah pengguna internet sebanyak 88.1 juta jiwa dari 252.4 juta jumlah penduduk Indonesia dan penetrasi pengguna internetnya yaitu sebesar 34.9 %.Perkembangan informasi diatas berkaitan dengan teoriperilaku manusia dalam mencari sebuah informasi, Saepudin (2009:17) mengatakan bahwa perilaku pencarianinformasi merupakan aktivitas pemakai untuk mencari, mengumpulkan, danmemakai informasi yang mereka butuhkan.

Provinsi papua barat merupakan provinsi yang berada di sebelah timur indonesia dengan ibu kota provinsi manokwari, penggunaan teknologi informasi pada provinsi ini dianggap masih terlalu rendah dibandingkan provinsi lainnya ini terlihat dari jumlahpengguna internet Wilayah Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku memiliki jumlah 5,9 Juta.



**Gambar 1.2 : Penggunaan Internet di Indonesia tahun 2014**

Pada gambar 1.2 tersebut terlihat jelas bahwa jumlah penggunaan internet di wilayah Indonesia Timur sangat kecil. Jumlah 5.9 juta tersebut bukan hanya wilayah papua saja yang menggunakan internet, tetapi harus di bagi lagi ke 2 daerah lainnya yaitu, Nusa Tenggara dan Maluku. Jika dibagi 3 daerah maka, setiap daerah hanya mengakses 1.9 juta internet. Tentu saja ini hasil yang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah wilayah lainnya diindonesia.

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat dimana salah satu yang di prioritaskan adalah Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman dan wilayah perbatasan. Di Provinsi Papua Barat sendiri Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika masih menyatu dalam satu kantor.

Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Fak-Fak yang di bentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002. Namun Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimanapun masih belum terpisah, padahal di Kementerian sendiri kedua Kantor ini sudah berdiri terpisah karena memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting. Adapun Visi dan Misi serta Tujuan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana tahun 2011 - 2015 adalah *“Terwujudnya Pelayanan Moda Transportasi Darat, Laut dan Sungai serta Sistem Pelayanan Informasi Publik yang memadai”*

Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Sedangkan Fungsi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
2. Pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
3. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
4. Pembinaan dan pengembangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaimana (RPJMD) 2005 – 2010 Tentang Percepatan Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Wilayahdengan Program PembangunanTekekomunikasi dan Informasi. Program ini membahas tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik, dengan kegiatan pokok antara lain salah satunya yaitu Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Kaimana.

Untuk saat ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kaimana belum mempunyai rencana strategi yang mengatur tentang sistem informasi untuk mengimplementasikan Visi dari Dinas tersebut.Hal ini mengakibatkan beberapa masalah yang terjadi pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana seperti : (1) Pelayanan yang diberikan melalui sistem informasi yang ada belum terlalu maksimal. (2) Belum mapannya Rencana Strategi yang di bangun (3) Belum adanya kompetensi SDM yang memadai untuk penggunaan Sistem Informasi. (4) Belum adanya standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan penyebaran informasi antar sistem informasi secara andal, aman dan terpercaya. (5) Belum terintegrasinya sistem manajemen dan proses kerja. (6) Tidak adanya SOP khusus mengenai penggunaan SI/TI. Setiap organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan informasi secara sistematis serta melakukan analisis misi dan fungsi yang dilakukan, siapa yang melakukan, data dan informasi pendukung yang diperlukan untuk melakukan berbagai fungsi dan proses yang dibutuhkan untuk struktur informasi yang paling berguna (Tozer, 1996)

Selain permasalahan yang terjadi tersebut, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kantor Hubkominfo melalui kondisi saat ini dilihat dari sisi Technoware, Humanware, Organiware dan Infoware terlihat pada table berikut :

**Tabel 1.1 Analisis Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan Saat ini**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Infoware** | **Technoware** | **Humanware** | **Organiware** |
| * Pengelolaan data/informasi semuanya masih bersifat manual dengan menggunakan MS Office * Penyebaran informasi untuk kegiatan masih bersifat manual   Melalui surat. | ***Software :***   * OS Windows XP, W7 (32 bit dan 64 bit)   ***Hardware :***   * Perangkat computer berjumlah 12 unit. Laptop berjumlah 4 unit * Koneksi internet menggunakan Vsat. | Kemampuan dari Dinas sendiri dalam penguasaan SI sebagai pelaksana manajerial, pengelola data informasi tergolong sangat kecil. Karena belum memiliki tenaga ahli. | * Belum adanya regulasi daerah yang khusus untuk mengatur SI disemua Dinas. * Belum adanya struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam oprasional SI dan prosedur pelaksanaannya * Masih terdapat pos – pos informasi pada setiap bagian. |

Perlunya pembuatan Renstra Sistem Informasi bagi Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana sekarang ini adalah untuk menunjang kinerja dan pelayanan Dinas ini kedepan.Menurut Ward dan Peppard (2002) Penerapan Sistem Informasi dalam sebuah organisasi memiliki tiga sasaran utama. Pertama, memperbaiki efisiensi kerja dengan melakukan otomatisasi berbagai proses yang mengelola informasi. Kedua, meningkatkan keefektifan manajemen dengan memuaskan kebutuhan informasi guna pengambilan keputusan. Ketiga, memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan kopetitif organisasi dengan merubah gaya dan cara bisnis.

Pada lingkungan pemerintah Sistem Informasi lebih di kenal dengan disebutan E-Government, (*Electronic Government*).Dawes (2002), e-government merupakan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menyediakan jasa atau pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.Dalam mengembangkan e-Government setiap instansi harusmengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Perancangan eGovernment.Beberapa regulasi lain dari pemerintah pusat yang mendorong penggunaan e government kedapan adalah UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari rencana strategis, seperti yang diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa rencana strategis sangat dibutuhkan untuk memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan program pembangunan yang lebih komprehensif, efisien, efektif dan terpadu. Dengan adanya perencanaan strategis diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pentingnya sebuah organisasi yang menggunakan Rencana Strategis Sistem Informasi (Renstra SI) saat ini akan sangat menentukan kesuksesan Sistem Informasi kedepannya.(Robb, 2006) menyebutkan alasan - alasan lain yaitu : perlunya sinergi TI/SI dengan visi, misi, dan strategi organisasi, perubahan proses yang belum terpikirkan karena perubahan teknologi, dan kebutuhan alat kendali dan pemantauan atas penerapan teknologi dan sistem informasi.Manfaat Renstra Sistem Informasi diantaranya: Menyelaraskan arah dan prioritas pada Sistem Informasi, menciptakan manajemen yang efektif efisien, dan mengidentifikasi peluang Sistem Informasi untuk keunggulan kompetitif, Sistem Informasi yang dibangun tanpa perencanaan yang baik akan sulit terintegrasi, kurang efektif efisien, dan dapat menjadi penyebab kerugian finansial karena tidak sesuai prioritas, Organisasi dituntut tidak hanya memiliki Renstra Sistem Informasi namun juga melaksanakannya.

Agar tercapainya produk E-Government yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik maka dibutuhkan perencanaan strategis yang baik. Perencanaan strategis yang dimaksud adalah roadmap pembangunan jangka panjang yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan. Rencana Strategis diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan di sebelumnya, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang ***“ Rencana Strategi Sistem Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Publik “***. Pada penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh Perencanaan Strategi Sistem Informasi yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem informasi pada Kantor Perhubungan Komunikasi dan informatika kabupaten kaimana.

* 1. **Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian dalam penyusunan Rencana strategis Sistem Informasi ini adalah:

1. Pembahasan lebih difokuskan pada proses penyusunan Rencana Strategi Sistem Informasi Kantor Hubkominfo Kabupaten Kaimana.
2. Pembahasan Rencana Strategi Sistem informasidifokuskan pada pelayanan informasi publik di Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana.
3. Unit yang akan di Observasi adalah Kantor Hubkominfo Kabupaten Kaimana.

**1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi eksternal dan internal sistem informasi yang berjalan pada Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana.
2. Apa saja Kendala dalam implementasi SistrmInformasi pada Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana.
3. Bagaimana Rancangan Rencana Strategi Sistem Informasi yang akan diterapkan pada Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana.

**1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untukmengkaji dan mengetahui :

1. Kondisi eksternal dan internal sistem informasi sistem informasi pada Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana.
2. Kendala dalam implementasi Sistrm Informasi pada Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana.
3. Rancangan Rencna Strategi Sistem Informasi yang akan diterapkan pada Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana.

**1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian penyusunan Rencana Strategis Sistem Informasi Kantor Hubkominfo Kab. Kaimana ini, manfaat dari penelitian ini dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1. **Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini, manfaat teoritis yang akan diperoleh yaitu:

1. Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan manajemen strategi, dan khususnya ilmu pengetahuan dari perencanaan strategi sistem informasi.
2. Dapat di jadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
3. **Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini, manfaat praktis yang akan diperoleh yaitu:

1. Dapat di jadikan sebagai acuan untuk penerapan Rencana Strategi Sistem Informasi di Institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana
2. Memberikan pelayanan informasi publik yang optimal dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Kantor Hubkominfo Kabupaten Kaimana.